

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang lingkup Auditing

2.1.1.1 Definisi Auditing

Auditing adalah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi untuk menentukan dan membuat opini terhadap laporan keuangan terkait kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan sesuai standar audit yang ada. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:4):

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

“Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Menurut Hery (2019:10) definisi auditing adalah:

“pengauditan (auditing) didefinisikan sebagai proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Sedangkan menurut Sukrino Agoes (2012:4) defisini audit adalah:

“*auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Menurut ASOBAC (*A Statement Of Basic Auditing Concepts*) dalam Abdul Halim (2015:1) definisi auditing adalah:

“auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang bagaimana tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang kepentingan.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses pemeriksaan laporan keuangan, catatan-catatan, dan bukti-bukti yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan. Audit atau pemeriksaan harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independent.

2.1.1.2 Jenis – Jenis Audit

Jenis-jenis audit dibedakan menjadi beberapa dengan maksud untuk mengkhususkan tujuan atau sasaran yang akan dicapai dengan adanya audit tersebut.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:12) jenis audit yaitu:

1. “Audit operasional
Audit operasional meliputi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur kerja dan metode yang digunakan oleh organisasi. Tujuannya adalah untuk mendukung tingkat efisiensi dan efektifitas proses dan kinerja organisasi. Diakhir audit operasional, auditor harus membuat rekomendasi

untuk perbaikan manajemen agar kinerja manajemen dimasa depan sejalan dengan tujuan organisasi. Dalam audit operasional, penelaahan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup penilaian terhadap struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan semua bidang lain yang menjadi keahlian auditor. Dalam arti lain, audit operasi lebih seperti konsultasi manajemen, karena proses penilaian dilakukan secara subyektif untuk menentukan apakah efisiensi dan efektifitas operasi memenuhi standar yang ditetapkan.

2. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan adalah penilaian suatu entitas untuk tujuan memperoleh opini audit independen dari auditor bahwa laporan keuangan yang berlaku. Dalam menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan keuangan yang mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya.

3. Audit ketaatan.

Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah melaksanakan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, yang merupakan kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ditetapkan.”

Hery (2019:12) mengungkapkan bahwa jenis-jenis audit adalah sebagai berikut:

1. “Audit laporan keuangan, dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasainya meliputi posisi keuangan, laporan laba rugi komperhensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.
2. Audit pengendalian internal, dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan salitng terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.
3. Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah elah ditaati oleh entitas yang diaudit. Sebagai contoh, auditor memeriksa perjanjian yang dibuat dengan bankir atau pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi seluruh persayratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang.
4. Audit operasional, dilakukan untuk mereview (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif da efisien. Hasil akhir dari

audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini juga sering disebut audit kinerja atau audit manajemen.

5. Audit forensik, dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas keuangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.”

Adapun menurut Soekrisno Agoes (2012:11) jenis-jenis audit dibedakan atas:

1. “Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Internal (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.
4. Auditor Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *electronic data processing* (EDP).”

2.1.1.3 Tujuan Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (201:3):

“Tujuan audit adalah untuk menyediakan pengguna laporan keuangan opini auditor atas keberadaan laporan keuangan dalam semua hal yang material, menurut kerangka akuntansi keuangan yang berlaku, pendapat auditor meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan.”

Menurut Mulyadi (2017:73) Tujuan audit atas laporan keuangan yaitu:

“untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi umum di Indonesia. Karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Tujuan umum tersebut merupakan titik awal untuk mengembangkan tujuan khusus audit.”

Sedangkan menurut Dr. Alexander Thian (2021:59) tujuan auditing:

“untuk meningkatkan keyakinan bagi para pengguna laporan keuangan. Hal ini dicapai melalui sebuah pernyataan atau opini auditor tentang apakah laporan keuangan telah disusun, dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.”

Berdasarkan uraian diatas dapat diinterpretasikan bahwa tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam keuangan perusahaan dan hasil usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, auditor harus mengumpulkan bukti kompeten yang cukup dan auditor harus mengidentifikasi dan mengembangkan serangkaian tujuan audit khusus untuk setiap akun laporan keuangan. Oleh karena itu, tujuan suatu audit mengharuskan auditor untuk menyatakan pendapat atas kelayakan pelaporan keuangan sesuai dengan standar auditing.

2.1.1.4 Standar Audit

Dien Noviany & Eva Anggra (2022:27) mengungkapkan standar auditing adalah:

“Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*judgement*) yang digunakan saat pelaksanaan dan penyusunan laporan audit.”

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Rahmatika, Dien Noviany & Eva Anggra (2022:27) standar auditing diatur dalam PSA No. 01 (SA Sakti 150) yang meliputi 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar:

1. Standar Umum
 - a. Audit wajib dilakukan oleh satu atau lebih orang yang memiliki pelatihan dan keahlian cukup sebagai auditor.
 - b. Semua hal yang berkaitan pada independensi dan perikatan memuat sikap mental harus dipertahankan bagi auditor.

- c. Saat pelaksanaan dan penyusunan laporan auditnya, auditor harus memakai kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
 - a. Pekerjaan direncanakan kehati-hatian dan jika diperlukan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman memadai dalam pengendalian intern harus diolah untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, lingkup dan saat pengujian yang dilakukan.
 - c. Bukti audit kompeten cukup diperoleh mengikuti inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai landasan menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
 3. Standar Pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menyatakan laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
 - b. Laporan auditor harus menunjukkan adanya tidak konsisten (jika ada) penerapan prinsip akuntansi pada tahap penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibanding penerapan prinsip akuntansi dalam periode lalu.
 - c. Pengungkapan informatif laporan keuangan dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
 - d. Laporan auditor berisikan suatu pernyataan pendapat tentang laporan keuangan baik secara keseluruhan atau asersi pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat keseluruhan tidak diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan atas laporan keuangan, olehnya laporan auditor memuat petunjuk yang jelas terkait sifat dan tanggungjawab auditor (IAI, 2001:150.1 & 150.2)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa standar audit mengatur auditor untuk menyatakan apakah laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan pernyataan mengenai kas pendapatan laporan keuangan.

2.1.1.5 Jenis – Jenis auditor

Dr. Alexander Thian (2021:1) mengungkapkan bahwa jenis – jenis auditor dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

1. “Auditor Pemerintah, yaitu auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi - instansi pemerintah. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah, sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) yang merupakan auditor internal atau satuan pengawasan intern pada BUMN/BUMD.

2. Auditor forensik, profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi dan investigasi untuk membantu penyelesaian sengketa keuangan dan pembukuan atau dugaan telah terjadinya tindakan fraud (kecurangan).
3. Auditor internal, yaitu auditor yang bekerja pada suatu manajemen perusahaan, sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus-menerus. Memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian internal di satu perusahaan.
4. Auditor eksternal, sering disebut sebagai auditor independen atau akuntan publik bersertifikat (*Certified Public Accountant*). Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya. Beberapa auditor disebut “eksternal” atau “independen” karena mereka memang bukan karyawan dari entitas yang diaudit.”

Adapun Menurut Alvin A. Arens dalam Amir Abadi Jusuf (2017:38) jenis-jenis auditor adalah:

1. “Kantor Akuntan Publik
Kantor Akuntan Publik bertanggungjawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar dan banyak perusahaan serta organisasi non komersial yang lebih kecil. Kantor akuntan publik biasa disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Internal Pemerintah
Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional berbagai program pemerintah.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan
Auditor badan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dipimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPR.
4. Auditor Pajak
Direktorat Jendral (Ditjen) pajak bertanggungjawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab ditjen oajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi

peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.

5. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam. Tergantung pada yang mempekerjakan mereka.”

2.1.2 Independensi Auditor

2.1.2.1 Pengertian Independensi Auditor

Independensi adalah suatu sikap yang harus dimiliki seorang auditor saat melakukan tugas pengauditan. Independensi yaitu suatu kondisi dan posisi dimana auditor memiliki sikap bebas atau tidak terikat dengan pihak manapun, dapat diartikan bahwa keberadaan auditor adalah mandiri dengan tidak mengedepankan kepentingan pihak atau organisasi tertentu. Sikap independensi auditor juga merupakan cara pandang seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya, auditor yang memiliki sikap independensi dapat membantu auditor dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan audit.

Sikap independensi auditor adalah cara pandang seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Eler, Mark S. Beasley dan Chris E. Hogan yang dialihkan bahasa oleh Amir Abadi Jusuf (2017:134) independensi auditor adalah:

“Auditor independence is a mental altitude that is taking unbiased view point in the performance of audit tests during the accumulation and evaluation of evidences, the evaluation of the results, and the issuance of the audit report. Auditor independence has been assessed on two standards, that is in fact an in appearance.”

Artinya, “Independensi auditor adalah sikap mental yang mengambil pandangan tidak bias dalam kinerja tes audit selama akumulasi dan evaluasi

bukti, evaluasi hasil dan penerbitan laporan audit. Independensi auditor dinilai berdasarkan dua standar yaitu dalam fakta dan dalam penampilan.”

Sukrisno Agoes (2013:146) mengungkapkan independensi adalah:

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.”

Sedangkan menurut Arum Ardiningsih (2021:25) independensi adalah:

“Independensi adalah salah satu hal yang esensial untuk dipenuhi oleh seorang auditor, untuk menjamin kewajaran atas kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggungjawab manajemen. Jika akuntan tidak bersikap independen maka opini yang diberikannya tidak akan memberi tambahan nilai apapun. Independensi mencakup sisi tampilan dan kenyataan (*in appearance and in fact*).

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Teodorus M. Tuanakotta (2011:64) independensi adalah:

“Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa sikap independensi merupakan sikap yang harus dimiliki seorang audit. Independensi adalah sikap bebas dalam memeriksa laporan keuangan dan bebas dalam beropini tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, auditor berdiri sendiri sehingga dapat bersikap adil.

2.1.2.2 Jenis-jenis Independensi

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2016:103) mengungkapkan independensi terdapat dua unsur, yaitu:

1. Independensi dalam berpikir (*independence in mind*) mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak

bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independensi dalam fakta.

2. Independensi dalam penampilan (*Independence in appearance*) merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:34-35) pengertian independensi bagi akuntan publik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. "*Independence in appearance* (independensi dilihat dari penampilannya di struktur organisasi perusahaan).
2. *In fact*, akuntan publik seharusnya independen, sepanjang dalam menjalankan tugasnya memberikan jasa profesionalnya, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik profesionalnya, profesi akuntan publik, dan standar profesional akuntan publik. Jika tidak demikian, akuntan publik *in fact* tidak independensi.
3. *In mind*, misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi atau yang memerlukan audit *adjustment* yang material. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan *findings* tersebut untuk memeras klien walaupun hanya baru terpikirkan dan belum dilaksanakan. *In mind* auditor sudah kehilangan independensi nya."

Berdasarkan uraian diatas, maka seorang auditor harus bersikap bebas tanpa terpengaruh oleh segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pertimbangan atas fakta-fakta yang ditemukan dalam audit. Seorang auditor juga harus bersikap jujur kepada semua pihak yaitu manajemen ataupun perusahaan, dan masyarakat agar semuanya dapat menilai sejauh mana auditor bekerja dengan tidak meragukan independensi dan obyektifitasnya.

2.1.2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Independensi

Menurut Albin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:108) menyatakan ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi independensi, yaitu:

1. Kepemilikan finansial yang signifikan
Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrument utang dan modal (misal pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrumen derivatif (misal opsi).
2. Pemberian Jasa Non-audit

Konflik kepentingan yang paling nyata bagi Kantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa non-audit pada kliennya terus menerus menjadi perhatian penting bagi para pembuat regulasi dan pengamat.

3. Imbalan Jasa Non-audit dan Independensi
Cara auditor untuk berkompetensi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensi auditnya.
4. Tindakan hukuman antara KAP dan klien serta independensi
Ketika terdapat tindakan hukum atau niat untuk memulai tindakan hukum antara sebuah KAP dengan kliennya, maka kemampuan KAP dan kliennya untuk tetap objektif dipertanyakan.
5. Pergantian auditor
Riset di bidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk menggantinya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik dan mengurangi biaya.

2.1.2.4 Upaya Memelihara Independensi Auditor

Siti Kurnia Rahayu (2014:51) upaya memelihara independensi berupa persyaratan atau dorongan lain, hal tersebut antara lain:

1. Kewajiban hukum
Adanya saksi hukum bagi auditor yang tidak independen.
2. Standar auditing yang berlaku umum
Sebagai pedoman yang mengharuskan auditor mempertahankan sikap independen, untuk semua hal yang berkaitan dengan penugasan.
3. Standar pengendalian mutu
Salah satu standar pengendalian suatu mensyaratkan kantor akuntan publik menetapkan kebijakan dan prosedur guna memberikan jaminan yang cukup bahwa semua staf independen.
4. Komite audit
Merupakan sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.
5. Komunikasi dengan auditor terlebih dahulu
Auditor pengganti melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu sebelum penerima penugasan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai integritas manajemen.
6. Penjajagan pendapat mengenai penerapan prinsip akuntansi
Tujuan untuk meminimalisir kemungkinan manajemen menjalankan praktik membeli pendapat, hal ini merupakan ancaman potensial terhadap independen.

2.1.2.5 Aspek Independensi

Auditor harus selalu menjaga dan mempertahankan mental independensi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang diterapkan oleh IAI.

Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:64-65) menekankan tiga aspek dari independensi sebagai berikut:

1. “Independensi Program (*Programming Independence*)
Independensi program adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik dan prosedur audit, dan berapa dalamnya teknik dan prosedur audit.
2. Independensi Investigatif (*Investigative Independence*)
Independensi investigatif adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial yang akan diperiksa. Ini berarti, tidak boleh ada sumber informasi yang legitimate (sah) yang tertutup bagi auditor.
3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*)
Independensi pelaporan adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misalnya dalam bentuk pembatasan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dari pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau opini sebagai hasil pemeriksaan.”

Berdasarkan dari tiga dimensi tersebut, Mautz dan sharaf mengembangkan petunjuk yang mengidentifikasi apakah ada pelanggaran atas independensi. Mautz dan sharaf dalam Theodorus M. Tuankotta (2011:7) menyarankan:

1. “Independensi Program audit (*Programming Independence*)
 - a. Bebas dari tekanan atau intervensi manajerial atau friksi yang dimaksudkan untuk menghilangkan (*eliminate*), menentukan (*specify*) atau mengubah (*modify*) apapun dalam audit.
 - b. Bebas dari intervensi apapun dari sikap tidak kooperatif yang berkenaan dengan penerapan prosedur audit yang dipilih.
 - c. Bebas dari upaya pihak luar yang memaksakan pekerjaan audit itu direview diluar batas-batas kewajaran dalam proses audit.
2. Independensi Investigatif (*Investigative Independence*)

- a. Akses langsung dan bebas atau seluruh buku, catatan, pimpinan pegawai perusahaan dan sumber informasi lainnya mengenai kegiatan perusahaan, kewajiban dan sumber-sumbernya.
 - b. Kerjasama yang aktif dari pimpinan perusahaan selama berlansungnya kegiatan audit.
 - c. Bebas dari upaya pimpinan perusahaan untuk menugaskan atau mengatur kegiatan yang harus diperiksa atau menentukan dapat diterimanya suatu *evidential mette* (sesuatu yang mempunyai nilai pembuktian).
 - d. Bebas dari kepentingan atau hubungan pribadi yang akan mengilangkan atau membatasi pemeriksaan atas kegiatan, catatan atau orang yang seharusnya masuk dalam lingkup pemeriksaan.
3. Independensi Pelaporan (*Reporting Independence*)
- a. Bebas dari perasaan royal kepada seseorang atau merasa berkewajiban kepada seorang untuk mengubah dampak dari fakta yang dilaporkan.
 - b. Menghindari praktik untuk mengeluarkan hal-hal penting dari laporan formal dan memasukkannya kedalam laporan informal dalam bentuk apapun.
 - c. Menghindari penggunaan bahasa yang tidak jelas (kabur, samar-samar) baik yang disengaja maupun yang tidak didalam pernyataan fakta, opini dan rekomendasi dalam interpretasi.
 - d. Bebas dari upaya untuk memveto judgement auditor mengenai apa yang seharusnya masuk dalam laporan audit, baik yang bersifat fakta maupun opini.”

Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Mautz dan Sharaf sangat jelas dan masih relevan untuk auditor sampai hari ini. Petunjuk-petunjuk tersebut menentukan independen atau tidaknya seorang auditor.

2.1.3 Profesionalisme Auditor

2.1.3.1 Pengertian Profesionalisme Auditor

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dialih bahasakan oleh Wibowo dan Tim perti (2015:105) Profesionalisme auditor adalah:

“Profesionalisme auditor merupakan tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan

praktisi termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri.”

Menurut *The Institute Of Internal Auditor* (2017:21) profesionalisme adalah:

“Professionalism is a vocation or occupation requiring advanced training and usually involving mental rather than manual work. Extensive training must be undertaken to be able to practice in the profession. A significant provides a valuable service to the community.”

Dalam penjelasan *The Institute Of Internal Auditor* dapat diartikan bahwa Profesionalisme adalah panggilan atau pekerjaan yang membutuhkan pelatihan lanjutan dan biasanya melibatkan pekerjaan mental daripada pekerjaan manual. Pelatihan ekstensif harus dilakukan untuk dapat berlatih dalam profesi. Sejumlah besar pelatihan terdiri dari komponen intelektual, profesi ini memberikan layanan yang berharga bagi masyarakat.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:69) definisi profesionalisme auditor adalah:

“Profesionalisme auditor adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor merupakan sikap seorang auditor dimana mampu menyelesaikan tugasnya dengan efektif dan efisien tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak sehingga dapat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, karena profesionalisme auditor merupakan sikap auditor dalam melaksanakan audit dengan maksimal dan dengan etika yang tinggi, khususnya dalam mendeteksi kecurangan perlu didukung dengan sikap profesionalisme, karena penyebab terjadinya kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan salah satunya rendahnya sikap profesionalisme yang auditor miliki.

2.1.3.2 Ciri-Ciri Profesionalisme Auditor

Menurut pengertian umum, seseorang dianggap profesional ketika memenuhi tiga kriteria, yaitu kemampuan untuk melakukan tugas dibidangnya, melakukan tugas atau profesi yang menetapkan standar standar untuk profesi terkait, dan melakukan tugas profesinya sesuai dengan etika profesi yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2008:156) seseorang yang memiliki profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan aktivitas kerja yang profesional. Kualitas profesional ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendeteksi 'kemampuan ideal'.
Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawai tersebut. Yang dimaksud dengan 'piawai ideal' adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.
2. Meningkatkan dan memelihara 'imej profesional'.
Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesional melalui perwujudan perilaku profesional, perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.
3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesemoatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi.
Profesional ditandai dengan rasa bangga akan profesi yang diembannya. Dalam hal ini akan muncul rasa percaya diri akan profesi tersebut.

2.1.3.3 Konsep Profesionalisme Auditor

Dalam penelitian ini, dimensi profesionalisme adalah untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari

sikap profesional, dan sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional.

Menurut Hall (1968) dalam buku yang diterbitkan oleh Hayes (2008) terdapat 5 (lima) dimensi profesionalisme, yaitu:

1. Pengabdian pada profesi
Pengabdian pada profesi mencerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.
2. Kewajiban sosial
Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian
Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Stiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.
4. Keyakinan terhadap peraturan profesi
Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi
Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.

Dapat diinterpretasikan bahwa ada beberapa dimensi dan indikator dalam profesionalisme auditor ini, dan banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme seorang auditor.

2.1.3.4 Prinsip-prinsip Profesionalisme

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2011:71) yang di alih bahasa oleh Amir Abadi Jusuf menjelaskan mengenai prinsip dasar profesional auditor. Kelima prinsip dasar yang harus diterapkan oleh auditor adalah sebagai berikut:

1. “Prinsip Integritas
Para auditor harus terus terang dan jujur serta melakukan praktik secara adil dan sebenar benarnya dalam hubungan profesional mereka.
2. Prinsip objektivitas
Para auditor harus tidak berkompromi dalam memberika pertimbangan profesional karena adanya bias, konflik kepentingan atau karena adanya pengaruh dari orang lain yang tidak semestinya. Hal ini mengharuskan auditor untuk menjaga perilaku netral ketika menjalankan audit, menginterpretasikan bukti audit dan melaporkan laporan keuangan yang merupakan hasil penelaahan yang mereka lakukan.
3. Prinsip kompetensi
Auditor harus menjaga pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dalam tingkat yang cukup tinggi, dan tekun dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka ketika memberikan jasa profesional. Sehingga, para auditor harus menahan diri memberikan jasa yang mereka tidak memiliki kompetensi tugas menjalankan tugas tersebut, dan harus menjalankan tuugas profesional mereka sesuai dengan seluruh standar teknis dan profesi.
4. Prinsip kerahasiaan
Para auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama tugas profesional maupun hubungan dengan klien. Para auditor tidak boleh menggunakan informasi yang sifatnya rahasia dari hubungan profesional mereka, baik untuk kepentingan pribadi maupun demi kepentingan pihak lain. Para auditor tidak boleh mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak lain tanpa seizin klien mereka, kecuali jika ada kewajiban hukum yang mengharuskan mereka mengungkapkan informasi tersebut.
5. Prinsip perilaku profesional
Para auditor harus menahan diri dari setiap perilaku yang akan mendiskreditkan profesional mereka, termasuk melakukan kelalaian. Mereka tidak boleh membesar-besarkan kualifikasi atau pun kemampuan mereka, dan tidak boleh membuat perbandingan yang melecehkan atau tidak berdasar kepadapesaing”

2.1.3.5 Standar Profesional Akuntan

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2016) Seorang auditor dapat dikatakan profesional jika telah memenuhi dan mematuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Dengan adanya standar profesional akan mengikat auditor profesional untuk menuruti pada ketentuan profesi dan memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatannya dari awal hingga akhir.

Standar yang telah diterbitkan oleh Institut Akuntan Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), terdiri dari:

1. Standar umum
 - a. Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis sebagai auditor.
 - b. Auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi.
 - c. Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya, dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan seksama.
2. Standar pekerjaan lapangan
 - a. Sebagai tenaga profesional, seluruh pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan apabila menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya.
 - b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern.
 - c. Bahan bukti kompen yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
3. Standar pelaporan
 - a. Laporan auditor harus menyatakan laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
 - c. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
 - d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika pendapat secara

keseluruhan tidak dapat diberikan maka auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

2.1.4 Pengalaman Auditor

2.1.4.1 Pengertian Pengalaman Auditor

Sukrisno Agoes (2012:33) mengungkapkan definisi pengalaman auditor adalah:

“Pengalaman auditor merupakan auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.”

Neng ira (2016) menyebutkan bahwa pengalaman auditor adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerjanya yang telah ditempuh seorang auditor dalam memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik.

Ida Ayu Biksa dan I Dewa Nyoman W (2016) mengemukakan Pengalaman auditor adalah ukuran tentang lama waktu dan masa kerjanya yang telah dilalui seorang dalam memahami tugas-tugas pekerjaannya dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman auditor adalah keahlian dan pemahaman yang auditor miliki dan didapatkan dengan pendidikan dan juga pelatihan teknis yang cukup untuk menunjang pelaksanaan audit di lapangan. Auditor harus memiliki kualifikasi dalam melaksanakan audit nya, dengan adanya pengalaman auditor yang memadai sehingga dapat

memudahkan auditor dalam menemukan ketidakwajaran atas laporan keuangan yang disajikan oleh suatu organisasi atau klien.

2.1.4.2 Komponen Pengalaman auditor

Pengalaman seorang tidak bisa digambarkan secara nyata namun pengalaman seorang auditor dapat dijelaskan dari pengukuran pengalaman tersebut. Menurut Mulyadi (2014:25) terdapat tiga faktor dalam pengalaman auditor, yaitu antaranya sebagai berikut:

1. “Pelatihan Profesi

Pelatihan profesi berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, symposium, lokakarya dan kegiatan penunjang keterampilan yang lain. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, pengarahan yang diberikan oleh auditor senior kepada auditor junior juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk pelatihan karena kegiatan ini dapat meningkatkan kerja auditor, melalui program pelatihan dan praktik. Praktik audit yang dilakukan para auditor juga mengalami proses sosialisai agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ia temui, struktur pengetahuan auditor yang berhubungan dengan pendeteksian.

2. pendidikan

Pendidikan adalah keahlian dalam akuntan dan auditing dimulai dengan pendidikan formal yang diperluas dengan pengalaman praktik audit. Pendidikan dalam arti luas adalah pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan lanjut. Pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan lanjut yang dibutuhkan untuk menjadi akunan publik adalah:

- a. Sudah menempuh pendidikan dibidang akuntansi (S1 akuntansi + Ppak).
- b. On the job training selama 1.000 jam sebagai ketua tim audit/supervisor.
- c. Lulus ujian sertifikat akunan publik.
- d. Mengurus izin akunan publik kepada Departemen Keuangan untuk dapat melakukan kegiatan usahanya secara independen (membuka KAP).

3. Lama bekerja

Lama bekerja adalah pengalaman seseorang dan berapa lama seseorang bekerja pada masing-masing pekerja atau jabatan. Lama kerja auditor ditentukan oleh seberapa lama waktu yang digunakan oleh auditor dalam mengaudit industri klien tertentu dan seberapa lama auditor mengikuti jenis penugasan audit tertentu. Pengalaman yang dibutuhkan auditor dalam tugas auditnya antara lain:

- a. Pengalaman Umum (*General Experience*) pengalaman umum ini diperoleh dari lamanya auditor bekerja dibidang audit.
- b. Pengalaman Tentang Industri (*Industry Experience*) pengalaman tentang industri ini diperoleh dari lamanya auditor mengaudit industri klien tertentu.
- c. Pengalaman Tentang Tugas Audit Tertentu (*Task-Specific Experience*) pengalaman tentang tugas audit diperoleh dari lamanya auditor mengikuti penugasan audit tertentu.”

2.1.4.3 Kriteria Pengalaman Auditor

Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan publik (SK MenKeu No 17/PMK.01/2008) tentang Jasa Akuntan Publik menyebutkan bahwa:

“ Seorang akuntan publik harus memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 (seribu jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin rekan KAP”

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.25/PMK.01/2014 bagian keempat pengalaman di bidang Akuntansi Pasal 5 menjelaskan bahwa:

1. Pengalaman di bidang akuntansi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pengalaman praktik di bidang akuntansi, termasuk bekerja yang tugas utamanya di bidang akuntansi, atau
 - b. Pengalaman sebagai pengajar di bidang akuntansi.

2. Pengalaman di bidang akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir.
3. Disetarakan telah memiliki pengalaman dibidang akuntansi selama 1 (satu) tahun bagi seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, magister (S-2), atau doctor (S-3) yang menekankan penerapan prinsip-prinsip akuntansi.

2.1.5 Kecurangan

2.1.5.1 Pengertian Kecurangan

Kecurangan (*Fraud*) identik dengan sesuatu yang dikerjakan dengan ketidakjujuran atau penipuan dengan sengaja. Kecurangan (*Fraud*) biasanya terjadi dengan atau tanpa sengaja dilakukan hingga telah melanggar aturan atau hukum dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Muhammad Noval (2019:145) kecurangan (*fraud*) adalah:

“Kecurangan merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan kecurangan didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja.”

Hery (2016:1) mengungkapkan definisi kecurangan (*fraud*) adalah:

“Kecurangan menggambarkan setiap penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset.”

Menurut Ajeng Wind (2017:3) tindakan kecurangan dapat dibagi menjadi 4 hal yang mendasar, yaitu sebagai berikut:

- “sebuah kesalahan penyajian yang bersifat material.
- *Scienter*, adalah maksud untuk melakukan penipuan, manipulasi, atau melakukan kecurangan.

- *Realince*, adalah seseorang yang menerima representasi cukup dan dapat dibenarkan dari representasi tersebut.
- Kerusakan, adalah kerusakan keuangan yang diakibatkan dari tiga hal diatas.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bawah definisi kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan curang yang telah melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dengan menipu atau melakukan kekeliruan pada laporan keuangan dengan maksud untuk mengambil aset atau hak orang lain demi keuntungan diri sendiri atau sekelompok orang, sehingga hal ini dapat merugikan orang lain.

2.1.5.2 Jenis-jenis Kecurangan

Menurut Karyono (2013:17-24) kecurangan terbagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. “Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudlent Financial Statement*)
Kecurangan laporan ini terdiri dari kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*non financial statement*) dengan menyajikan laporan keuangan menjadi lebih baik ataupun lebih buruk dari yang sebenarnya. Kecurangan ini bertujuan untuk:
 - a. Meninggikan nilai kekayaan untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan saham, karena nilainya naik.
 - b. Untuk mendapatkan sumber pembiayaan atau memperoleh persyaratan yang lebih menguntungkan, dalam kaitannya untuk kredit perbankan atau kredit lembaga keuangan lainnya.
 - c. Untuk menggambarkan rentabilitas atau perolehan laba yang lebih baik.
 - d. Untuk menutupi ketidakmampuan dalam menghasilkan uang/kas.
 - e. Untuk menghilangkan persepsi negatif pasar.
 - f. Untuk memperoleh penghargaan/bonus karena kinerja perubahan baik.
2. Kecurangan Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)
Penyalahgunaan aset terdiri dari kecurangan kas, kecurangan persediaan dan aset lain.
 - a. Kecurangan Kas
Kecurangan kas terdiri dari kecurangan penerimaan kas sebelum dicatat, kecurangan kas setelah dicatat dan kecurangan pengeluaran kas termasuk kecurangan penggantian biaya.
 - b. Kecurangan Persediaan dan Aset Laib
Kecurangan persediaan barang dan aset lainnya terdiri dari pencurian dan penyalahgunaan. Seperti pengambilan persediaan barang di gudang karena penjualan atau pemakaian untuk perusahaan tanpa ada upaya untuk menutupi pengambilan tersebut dalam akuntansi atau pencatatan gudang.

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi disini terdiri atas pertentangan kepentingan, penyuaipan, hadiah tidak sah dan pemerasan ekonomi. Yang secara umum perbuatan ini dapat merugikan prang lain. Adapun bentuk korupsi tersebut terdiri dari:

a. Pertentangan Kepentingan

Bentuk korupsi ini terjadi ketika karyawan atau manajer mempunyai kepentingan pribadi pada suatu kegiatan atau transaksi bisnis pada organisasi dimana dia bekerja, kepentingan tersebut berlawanan dengan kepentingan organisasinya.

b. Suap

Suap adalah pemberian, permohonan atau penerimaan atas sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan seseorang karena pekerjaannya. Sesuatu yang bernilai tersebut dapat berupa uang, pelunasan hutang, hiburan, fasilitas, keuntungan bisnis, janji-janji manis, pinjaman dan sebagainya.

c. Pemberian tidak sah

Pemberian tidak sah adalah pemberian sesuatu yang bernilai kepada seseorang karena keputusan yang diambil oleh seseorang. Keputusan itu berdampak memberi keuntungan kepada pemberi suatu yang bernilai tersebut.

d. Pemerasan Ekonomi

Pada bentuk korupsi ini, karyawan minta bayaran dari rekanan (vendir) atas keputusan yang diambil yang menguntungkan rekanan (vendor) tersebut. Caranya dengan jalan menakut-nakuti, dengan ancaman atau bujukan.

4. Kecurangan yang berkaitan dengan komputer

Pada zaman yang modern ini, kecurangan dapat dilakukan melalui komputer seperti mengubah masukan dan pengeluaran, menambah atau mengurangi pencatatan, menghilangkan dan memakukkan data palsu. Selain itu perusakan komputer itu sendiri, pencarian informasi dan harta kekayaan, kecurangan keuangan atau pencurian kas, dan penggunaan atau penjualan jasa komputer secara tidak sah.”

Menurut Ajeng Wind (2017:6) para akutan membedakan kecurangan dalam beberapa kategori, sebagai berikut:

1. “Penyelewengan aset

Kecurangan dalam bentuk ini terdiri atas: pencurian uang tunai atau persediaan, skimmin (pencurian uang lewat peng-captur-an nomor rekening orang lain), kecurangan dan penggelapan gaji. Penyelewengan aset adalah jenis paling umum dari kecurangan jenis ini. Contohnya, penyalahgunaan aset, seperti kecurangan pencairan dana pada penagihan piutang, penggajian, pengeluaran biaya, biaya pemeliharaan, dan pencairan kas di kasir.

2. Kecurangan dalam laporan keuangan

Fraud jenis ini ditandai dengan pengungkapan pelaporan keuangan, dengan maksud menipu pengguna laporan keuangan. Lebih khusus, kecurangan ini melibatkan manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang dipergunakan untuk pembuatan suatu laporan keuangan. Ada satu lagi jenis *fraud* yang dikenal yaitu korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kecurangan dapat berbentuk apapun dan kecurangan menggambarkan bahwa supaya penipuan yang disengaja dengan maksud untuk mengambil harta hak orang lain untuk kepentingan sendiri atau pribadi. Kecurangan dengan bentuk apapun dapat berpotensi merugikan banyak pihak.

2.1.5.3 Faktor Yang Mendorong Terjadinya Kecurangan

Terdapat tiga kondisi kecurangan karena laporan keuangan dan penggelapan aset, seperti yang dijelaskan oleh Arens et al., (2015) ini dikenal sebagai segitiga kecurangan.

1. Insentif atau tekanan

Manajemen dan karyawan lainnya merasakan intensif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Hal ini dapat terjadi ketika potensi bisnis sedang menurun. Misalnya, jika pendapatan perusahaan menurun, yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan dana, manajemen dapat memanipulasi untuk melindungi reputasi perusahaan.

2. Kesempatan atau peluang

Dalam situasi dimana manajemen atau karyawan lain dapat menciptakan peluang untuk melakukan kecurangan, ada dua faktor yang dapat atau mempengaruhi peluang untuk melakukan penipuan:

- a. Karena sistem pengendalian internal yang lemah, yaitu manajemen yang tidak efisien dengan ketergantungan yang berlebihan pada pelaku kecurangan atau pengawas yang tidak disiplin dalam pelaksanaan pengawasan.
- b. Kurangnya kepemimpinan organisasi, komitmen manajemen yang tinggi dan kurangnya teladan yang baik, sikap manajemen yang lalai,

ketidakpedulian atau kegagalan tindakan pendisiplinan pelaku kecurangan. Dan tidak menerapkan kode etik, independensi dan standar prosedur internal.

3. Sikap atau rasional

Sikap bahwa seseorang telah melakukan kecurangan akan mencari pembenaran atas tindakan yang telah mereka lakukan, untuk alasan yang salah.

Menurut Hery (2014:200) ada tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, ketiga kondisi tersebut adalah:

1. Insentif atau tekanan, manajemen maupun karyawan memiliki insentif, dorongan, atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Peluang, keadaan yang memberikan peluang untuk kesempatan bagi manajemen maupun karyawan untuk melakukan kecurangan.
3. Perilaku atau pembenaran atas tindakan, suatu perilaku atau karakter yang membuat manajemen maupun karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, atau lingkungan yang membuat mereka menjadi bertindak tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur tersebut.

2.1.6 Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki auditor dalam menemukan kecurangan. Ada tiga jenis kecurangan yaitu korupsi, penyalahgunaan aktiva dan kecurangan laporan keuangan. Auditor yang bekerja dengan hati-hati, membuat keputusan yang akurat, dan agresif dalam pengumpulan informasi dan bukti audit dapat mendeteksi kecurangan (Gizta 2020).

Menurut Karyono (2013:91) mengungkapkan pendeteksian kecurangan adalah:

“Deteksi *fraud* adalah tindakan untuk mengetahui bahwa kecurangan (*fraud*) yang terjadi siapa pelakunya, siapa korbannya dan apa penyebabnya”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:21) kemampuan mendeteksi kecurangan adalah:

“Sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai *fraud*.”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:34) tujuan mendeteksi kecurangan adalah:

“Upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan.”

Menurut Muchlis (2015) kemampuan dalam mendeteksi kecurangan adalah:

“kemampuan dalam mendeteksi kecurangan merupakan kemampuan untuk memahami gejala kecurangan, dalam memahami gejala kecurangan auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai sehingga dapat mengidentifikasi gejala terjadinya kecurangan.”

Menurut Nasution, Hafifah dan Fitriany (2012) definisi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah:

“Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kekurangan suatu laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan maupun organisasi dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan tersebut.”

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) No. 01 Tahun 2007 bagian Pemeriksaan dengan tujuan tertentu No. 06 menyatakan:

“Seorang auditor dituntut untuk merancang pemeriksaan untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan Kecurangan (*fraud*), serta ketidakpatuhan (*abuse*).”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah sebagai proses untuk menemukan tindakan ilegal yang mengakibatkan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan.

Standar tersebut menjelaskan begitu besar tanggung jawab seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan atau *fraud*, tetapi pada fakta yang terjadi dilapangan, berbagai kasus kegagalan dan ketidakmampuan seorang auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan hal ini memuktikan bahwa masih lemahnya kepatuhan seorang auditor terhadap standar baik yang telah ditetapkan.

2.1.6.1 Dimensi Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

Menurut Karyono (2013:92-94) kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan antara lain:

1. Kemampuan pengujian pengendalian intern
Pengujian pengendalian intern ini meliputi pengujian pelaksanaan secara mendadak dan secara acak. Hal ini untuk mendeteksi kecurangan yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian inern yang ada tidak berfungsi efektif.
2. Kemampuan audit keuangan atau audit operasional
Pada kedua jenis audit ini tidak ada keharusan auditor untuk mendeteksi dan mengungkaokan adanya kecurangan, akan tetapi auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga kecurangan dapat terdeteksi.
3. Kemampuan mengumpulkan informasi dengan teknik elisitasi
Pengumpulan informasi dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi. Cara pendeteksian kecurangan ini dilakukan secara tertutup dan secara diam-diam mencari informasi tentang pribadi seseorang yang sedang dicurigai sebagai pelaku kecurangan.
4. Kemampuan penggunaan prinsip pengecualian dalam pendendalian dan prosedur
Pengecualian yang dimaksud disini adalah:
 - a. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan atau di kompromikan
 - b. Transaksi-transaksi yang janggal, misalnya: waktu transaksi terlalu banyak atau terlalu sedikit, tempat transaksi terlalu menyimpang dari biasanya.
 - c. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun.
 - d. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.
5. Kemampuan mengkaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi
Dari hasil uji diperoleh penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan dan sasaran organisasi. Penyimpangan tersebut bukan karena adanya yang wajar dari aktivitas bisnis yang lazim.

6. Pendekatan reaktif

Pendekatan reaktif meliputi adanya pengaduan dan keluhan karyawan, kecurigaan, dan intuisi atasan.

Selain internal organisasi, keterlibatan pihak eksternal seperti auditor eksternal dapat memungkinkan penilaian yang objektif untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan adalah wajar dengan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran.

Berdasarkan penilaian tersebut, maka auditor eksternal harus menunjukkan sikap profesional dalam melaksanakan tugasnya.

2.1.6.2 Upaya Mendeteksi Kecurangan

Menurut Muhammad Noval (2019:151-155) mendeteksi kecurangan dapat dilakukan dengan dua cara:

1. *Critical Point Auditing* (CPA)

CPA merupakan suatu teknik pemeriksaan atas catatan pembukuan, agar suatu manipulasi dapat diidentifikasi.

a. Analisis Tren

Pengujian ini terutama dilakukan atas kewajaran pembukuan pada rekening buku besar dan menyangkut pula pembandingannya dengan data sejenis untuk periode sebelumnya maupun dengan sejenis dari cabang-cabang perusahaan. Data yang digunakan biasanya berupa: rekening buku besar, Neraca, dan Anggaran.

b. Pengujian Khusus

Dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya kecurangan.

1) Pembelian

Kecurangan pembelian umumnya dilakukan dengan cara meninggikan nilai yang terdapat dalam faktur. Cara lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pembelian fiktif.

Langkah yang dapat digunakan untuk meyakinkan keabsahan tersebut adalah dengan membandingkan data pemasok dengan data karyawan perusahaan, tentang alamat dan nomor teleponnya. Pengujian ini berguna untuk mengetahui apabila karyawan menciptakan pemasok fiktif dengan menggunakan alamat karyawan tersebut atau alamat kerabatnya untuk menerima pengiriman uang dari perusahaan.

2) Penjualan dan Pemasaran

Kecurangan dalam aktivitas ini biasanya dilakukan dengan seolah-olah terjadi penjualan yang diikuti dengan pengiriman barang namun tanpa pendebitan pada rekening debitur.

Langkah pengujian yang harus dilakukan adalah lakukan pengujian terhadap pembeli yang memperoleh harga terendah/memperoleh potongan harga paling besar, teliti saldo piutang yang melampaui plafon kredit, teliti pembayaran/pelunasan piutang yang melampaui batas waktu tertentu, kemudian lakukan analisis atas pesanan penjualan, catatan gudang dan faktur, selanjutnya bandingkan antara ketiganya.

2. *Job Sensitivity Analysis* (JSA)

Teknik analisis ini didasarkan pada suatu asumsi, yakni bila seseorang/sekelompok karyawan bekerja pada posisi tertentu, peluang/tindakan negative (kecurangan) apa saja yang dapat dilakukan. Sehingga pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dapat dilakukan misalnya dengan memperketat pengendalian intern pada posisi-posisi yang rawan kecurangan.

a. Metode Pendekatan

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi semua posisi pekerjaan di dalam perusahaan yang menjadi obyek pemeriksaan. Langkah berikutnya adalah menyiapkan analisis setiap pejabat. Simpula yang diperoleh dari langkah ini harus dapat menunjukkan spesifikasi setiap pekerjaan dan mencatat perbedaan antara akses yang diperbolehkan dengan akses yang direncanakan.

b. Pengawasan Rutin

Suatu hal yang mudah bagi pelaku kejahatan dalam suatu perusahaan untuk beroperasi, bila mana manajer sibuk dengan tanggung jawab lain. Dalam melakukan pengendalian juga harus diperhatikan hal-hal seperti bawahan lebih pandai dari atasannya, atau bila atasan memiliki bawahan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda.

c. Karakter Pribadi

Karakter pribadi karyawan harus dipertimbangkan. Hal-hal yang harus diperhatikan seperti:

1. Kekayaan yang tidak bisa dijelaskan
2. Pola hidup mewah
3. Pegawai yang sering merasa kecewa/tidak puas atas keputusan manajemen/tidak naik-naik pangkat
4. Sifat egois dari karyawan (mementingkan diri sendiri)
5. Karyawan yang sering mengabaikan instruksi/prosedur
6. Karyawan yang merasa dianggap paling penting

d. Tindak lanjut

Hasil analisis akan memberkan gambaran tentang jenis pekerjaan mana yang mengandung risiko tinggi dan metode *fraud* yang bagaimana yang sebaiknya diterapkan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Peneliti Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi bahan masukan yang beraikatan dengan Pengaruh Independensi, Profesionalisme auditor dan Pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Ida Ayu Indira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016)	Pengaruh Pengalaman, Independensi, Skeptisme Profesional Auditor Pada Pendeteksian Kecurangan	1. Pengalaman, Independensi, dan Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan	<p>Persamaan: Pada penelitian sekarang Variabel (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Independensi • Pengalaman <p>Variabel (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendeteksian Kecurangan <p>Perbedaan: Tidak menggunakan Variabel (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skeptisme profesional • Tempat penelitian

2	Trinanda Hanum Hartan, Indarto Waluyo (2016)	Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi Dan Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan	1. Skeptisme profesional, Independensi dan Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.	<p>Persamaan: Pada penelitian sekarang Variabel (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Independensi <p>Variabel (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan auditor dalam Mendeteksi kecurangan <p>Perbedaan: Tidak menggunakan Variabel (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skeptisme Profesional • Kompetensi • Tempat penelitian
3	Neng Ira Nofryanti (2016)	Pengaruh Profesionalisme Dan Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan	1. Profesionalisme dan Pengalaman Auditor Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan	<p>Persamaan: Pada penelitian sekarang Variabel (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Independensi <p>Variabel (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman auditor • Kemampuan auditor dalam Mendeteksi kecurangan <p>Perbedaan: Pada penelitian sekarang</p> <ul style="list-style-type: none"> • menambahkan variabel (X) • tempat penelitian
4	Luthfiana Meyda Kusuma, Nurmala Ahmar Dan Jmv Mulyadi (2021)	Pengaruh Profesionalisme, Kompetensi, Peran Whistleblower Dan Pengalaman Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan Pada Kementerian	1. Profesionalisme, Peran Whistleblower dan Pengalaman Auditor Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan	<p>Persamaan: Pada penelitian sekarang Variabel (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Profesionalisme <p>Variabel (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman Auditor • Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan <p>Perbedaan:</p>

		Ketenagakerjaan RI		Tidak menggunakan Variabel (X): <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi • Peran Whistleblower • tempat penelitian
5	Marcellina Widiyastuti, Sugeng Pamudji (2009)	Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (<i>Fraud</i>).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 2. Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 3. Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 	<p>Persamaan: Pada penelitian sekarang Variabel (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Independensi • Profesionalisme <p>Variabel (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. <p>Perbedaan: Tidak menggunakan Variabel (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi • Tempat penelitian
6	Safira Idriyani dan Luqman Hakim (2021)	Pengaruh Pengalaman Audit, Skeptisme Profesional dan Time Pressure terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Fraud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalaman audit dan skeptisme auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. 2. time pessure berpengaruh negatif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud 	<p>Persamaan: Pada penelitian sekarang Variabel (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman Auditor <p>Variabel (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan auditor mendeteksi Fraud <p>Perbedaan: Tidak Menggunakan Variabel (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skeptisme Profesional • Time Pressure <p>Variabel (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanggungjawab • Tempat Penelitian
7	Evie Sukma	Pengaruh Pengalaman Auditor, Independensi, dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kemampuan 	<p>Persamaan: Pada penelitian sekarang Variabel (X):</p>

		<p>Keahlian Profesional terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Skeptisisme Professional Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>mendeteksi kecurangan</p> <p>2. independensi tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan</p> <p>3. keahlian profesional berpengaruh negatif terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan</p> <p>4. skeptisme profesional memperlemah hubungan antara pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.</p> <p>5. skeptisme profesional tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.</p> <p>6. skeptisme profesional memperkuat pengaruh keahlian profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman auditor • Independensi • Profesionalisme <p>Variabel (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan <p>Perbedaan:</p> <p>Tidak menggunakan Variabel Skeptisisme professional sebagai moderasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tempat penelitian
--	--	---	--	---

			kecurangan laporan keuangan.	
--	--	--	------------------------------	--

Tabel 2. 2
Faktor – Faktor yang diduga mempengaruhi kemampuan auditor
berdasarkan penelitian sebelumnya

Nama Penelitian	Tahun	Profesionalisme	Independensi	Skeptisme Profesional	Pengalaman Auditor	Kompetensi	Peran Whistleblower	Tekanan Waktu	Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan
Ida Ayu Indira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016)	2016	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
Trinanda Hanum Hartan, Indarto Waluyo (2016)	2016	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓
Neng Ira Nofryanti (2016)	2016	✓	-	-	✓	-	-	-	✓
Luthfiana Meyda Kusuma, Nurmala Ahmar Dan Jmv Mulyadi (2021)	2021	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓

Marcellina Widiyastuti, Sugeng Pamudji (2009)	2009	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓
Safira Idriyani dan Luqman Hakim	2021	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
Evie Sukma	2020	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓
Gebbie Rizki Octavia Rosaeni	2023	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓

Keterangan: Tanda ✓ : diteliti

Tanda - : tidak diteliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan:

1. Profesionalisme, diteliti oleh Neng Ira Nofryanti (2016), Luthfiana Meyda Kusuma, Nurmala Ahmar Dan Jmv Mulyadi (2021), Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009), Evie Sukma (2020).
2. Independensi, diteliti oleh Ida Ayu Indira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Trinanda Hanum Hartan, Indarto Waluyo (2016), Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009), Evie Sukma (2020).

3. Skeptisme Profesional, diteliti oleh Ida Ayu Indira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Trinanda Hanum Hartan, Indarto Waluyo (2016), Safira Idriyani dan Luqman Hakim (2021), Evie Sukma (2020).
4. Pengalaman auditor, diteliti oleh Ida Ayu Indira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Neng Ira Nofryanti (2016), Luthfiana Meyda Kusuma, Nurmala Ahmar Dan Jmv Mulyadi (2021), Safira Idriyani dan Luqman Hakim (2021), Evie Sukma (2020).
5. Kompetensi, diteliti oleh Trinanda Hanum Hartan, Indarto Waluyo (2016), Luthfiana Meyda Kusuma, Nurmala Ahmar Dan Jmv Mulyadi (2021), Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009).
6. Peran Whistleblower diteliti oleh Luthfiana Meyda Kusuma, Nurmala Ahmar Dan Jmv Mulyadi (2021).
7. Tekanan waktu diteliti oleh Safira Idriyani dan Luqman Hakim (2021)
8. Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, diteliti oleh Ida Ayu Indira Biksa dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016), Trinanda Hanum Hartan, Indarto Waluyo (2016), Neng Ira Nofryanti (2016), Luthfiana Meyda Kusuma, Nurmala Ahmar Dan Jmv Mulyadi (2021), Marcellina Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009), Safira Idriyani dan Luqman Hakim (2021), Evie Sukma (2020).

2.2.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

Independensi yaitu suatu kondisi dan posisi dimana auditor memiliki sikap bebas atau tidak terikat dengan pihak manapun, dapat diartikan bawah keberadaan

auditor adalah mandiri dengan tidak mengedepankan kepentingan pihak atau organisasi tertentu.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Eler, Mark S. Beasley dan Chris E. Hogan yang dialihkan bahasa oleh Amir Abadi Jusuf (2017:134) independensi auditor adalah:

“Auditor independence is a mental attitude that is taking unbiased view point in the performance of audit tests during the accumulation and evaluation of evidences, the evaluation of the results, and the issuance of the audit report. Auditor independence has been assessed on two standards, that is in fact and in appearance.”

Artinya, “Independensi auditor adalah sikap mental yang mengambil pandangan tidak bias dalam kinerja tes audit selama akumulasi dan evaluasi bukti, evaluasi hasil dan penerbitan laporan audit. Independensi auditor dinilai berdasarkan dua standar yaitu dalam fakta dan dalam penampilan.”

Ida Ayu Indira dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2016) menunjukkan bahwa independensi auditor memiliki pengaruh yang besar terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Jadi dalam melakukan proses pengauditan auditor harus tetap mempertahankan independensi yang tinggi sehingga hasil auditnya dapat dipercaya.

Trinanda Hanum Hartan dan Indarto Waluyo (2016) menunjukkan bahwa independensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkatkan pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Sikap independensi berdampak terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan karna independensi merupakan suatu kebebasan auditor beropini dalam

melakukan pengauditan yang senyatanya terhadap laporan keuangan, sehingga keandalan laporan yang diberikan auditor tersebut dapat dipercayaa oleh semua pihak yang berkepentingan terutama dalam mendeteksi kecurangan sebuah laporan keuangan untuk menghindari salah saji material. Dengan auditor tidak terpengaruh oleh pihak mana pun, maka semakin tinggi auditor memegang sikap independensi, sehingga semakin tinggi kualias audit yang diberikannya.



Gambar 2. 1
Gambar Kerangka Pemikiran Pengaruh Independensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

2.2.3 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

Profesionalisme merupakan sikap auditor dimana auditor memiliki tanggungjawab bertindak dalam melakukan tugas pengauditan lebih dari sekedar tanggungjawab pada dirinya sendiri agar mampu menghadapi setiap godaan yang terjadi selama proses audit tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dialih bahasakan oleh Wibowo dan Tim perti (2015:105) Profesionalisme auditor adalah:

“Profesionalisme auditor merupakan tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri.”

Neng Ira Nofryanti (2016) menyatakan secara parsial profesionalisme auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, dengan meningkatnya sifat profesionalisme auditor maka akan semakin tinggi kemampuan

Pada penelitian Marcelline Widiyastuti dan Sugeng Pamudji (2009) Profesionalisme mempunyai pengaruh signifikan yang positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*Fraud*). Semakin meningkatnya profesionalisme seorang auditor dalam menjalankan tugasnya, maka kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga meningkat karena auditor memiliki keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Profesionalisme berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan sebab auditor memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya melebihi tanggungjawab pada diri sendiri. Dengan adanya rasa tanggungjawab auditor akan melaksanakan audit semaksimal mungkin dan etika yang tinggi dengan tidak terpengaruhi oleh pihak manapun.



Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

2.2.4 Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

Pengalaman auditor merupakan suatu keahlian dan keterampilan serta pemahaman yang dimiliki seorang auditor untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Keahlian dan keterampilan auditor didapatkan dengan pendidikan atau pelatihan, dengan melakukan pekerjaan yang sama dengan berulang auditor pun dapat menambah keterampilan serta pemahamannya.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:33) mengungkapkan definisi pengalaman auditor adalah:

“Pengalaman auditor merupakan auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.”

Neng Ira Nofryanti (2016) menyatakan secara parsial pengalaman auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi

kecurangan, maka semakin meningkat pengalaman seorang auditor maka akan semakin baik kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Pada penelitian Safira Indriyani dan Luqman Hakim (2021) pengalaman audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. Hal ini bermakna pengalaman menjadi faktor penting dalam mendeteksi kecurangan. Pengalaman audit seorang auditor didapat melalui banyaknya penugasan, lamanya sebagai auditor maupun keterampilan yang terus diasah. Hal Ini mampu menambah bekal atau pengalaman dari auditor sehingga ia mampu melihat adanya kejanggalan yang mungkin mengarah pada adanya tindak kecurangan

Pengalaman auditor perlu di miliki seorang auditor karena dengan adanya pengalaman auditor dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terdapat pada laporan keuangan klien. Pengalaman auditor merupakan tanggungjawab keahlian serta pemahaman auditor dalam memeriksa laporan keuangan. Seorang auditor harus memiliki kualifikasi dalam melaksanakan tugasnya agar memudahkan pelaksanaan tugasnya dalam menemukan ketidakwajaran atau terdapat nya kecurangan yang terjadi atas laporan keuangan yang disajikan oleh suatu organisasi atau pihak-pihak tertentu. Semakin tinggi berpengalaman maka akan semakin berkompeten.



Gambar 2. 3
Kerangka Pemikiran Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan

2.2.5 Pengaruh Independensi, Profesionalisme auditor, Pengalaman auditor secara simultan terhadap Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan

Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Alvin A. Arens yang dialih bahasakan Herman Wibowo (2016:78) Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kualitas dari seorang auditor dalam menjelaskan kurang wajarnya suatu laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan maupun organisasi dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan tersebut. Kemampuan auditor dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti independensi, profesionalisme auditor, dan pengalaman auditor yang dimiliki auditor.

Independensi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan dimana seorang auditor memiliki kebebasan dan tidak akan terpengaruh kepada pihak manapun sekalipun auditor mendapatkan gangguan atau tekanan dari pihak lain. Independensi merupakan cerminan bahwa seorang auditor memiliki integritas yang tinggi sebagai auditor profesional.

Semakin auditor mempertahankan sikap independensinya maka semakin tinggi kualitas seorang audit sehingga mendapatkan kepercayaan dari publik pun meningkat, karena laporan keuangan tidak ada manipulasi sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

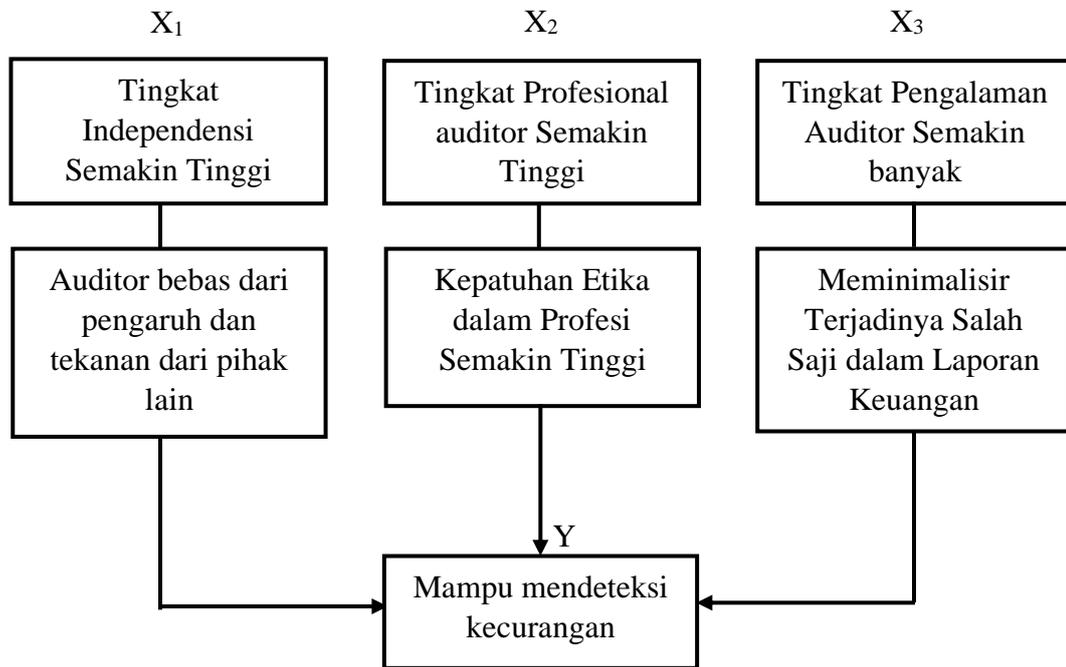
Profesionalisme auditor merupakan hal yang sangat penting dimiliki seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan, sebab profesional merupakan sikap atau mental dalam bentuk komitmen atau tanggungjawab seorang auditor dalam menjalankan tugasnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas profesionalnya dengan mendapatkan kepercayaan dari publik terhadap jasa yang diberikan auditor. Karena profesional mempunyai makna yang berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepandaian khusus dalam menjalankannya. Auditor perlu kepercayaan dari publik, sebab jika pemakai jasa tidak memiliki keyakinan pada auditor dalam mendeteksi kecurangan, maka kemampuan para profesional itu untuk memberikan jasa kepada klien dan masyarakat secara efektif akan berkurang. Semakin auditor menjaga tanggungjawab dengan memegang etika yang tinggi dengan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun maka akan meningkatkan kualitas audit yang lebih baik lagi dan menyajikan laporan keuangan yang semakin baik, terutama apabila terdapat kecurangan didalamnya.

Pengalaman auditor juga mempengaruhi kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, pengalaman auditor adalah keahlian atau kemahiran serta pemahaman yang dimiliki seorang auditor untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Pengalaman auditor didapatkan salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Seorang auditor yang memiliki pengalaman dan keahlian dengan jam terbang yang

lebih banyak dan sudah pernah menemukan kecurangan tentu saja akan meningkatnya pengetahuan auditor yang akan memudahkan auditor dalam mengidentifikasi kasus kecurangan. Auditor yang memiliki pengalaman yang berbeda, akan berbeda pula dalam menanggapi informasi yang diperoleh selama melakukan tugas pemeriksaan dan dalam memberikan kesimpulan audit terhadap obyek yang diperiksa. Semakin banyak nya pengalaman yang auditor miliki, maka kemampuan mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan akan semakin tepat dan akurat.

Maka berdasarkan uraian tersebut bahwa kemampuan auditor mendeteksi kecurangan dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti independensi, profesionalisme auditor dan pengalaman auditor. Pada proses pemeriksaan keuangan, auditor perlu memperhatikan sikap yang dapat menunjang kemampuan auditor mendeteksi kecurangan, seperti auditor harus mempertahankan sikap kebebasannya dengan tidak memihak mana pun dan tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun sehingga auditor dapat memberikan opini dengan bebas sesuai dengan bukti audit. Dan rasa tanggungjawab yang dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dengan konsisten menjaga profesionalnya untuk tidak tergodanya oleh gangguan luar maka kemampuan auditor mendeteksi kecurangan akan semakin meningkat. Dan dengan adanya pengalaman, auditor memiliki wawasan serta pengetahuan mengenai gejala kecurangan atau faktor faktor yang mempengaruhi kecurangan. . Semakin banyak nya pengalaman yang auditor miliki, maka kemampuan mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan akan semakin tepat. Hal ini saling berhubungan satu sama lain, Dapat diinterpretasikan

bahwasannya terdapat pengaruh simultan antara independensi, profesionalisme auditor dan pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

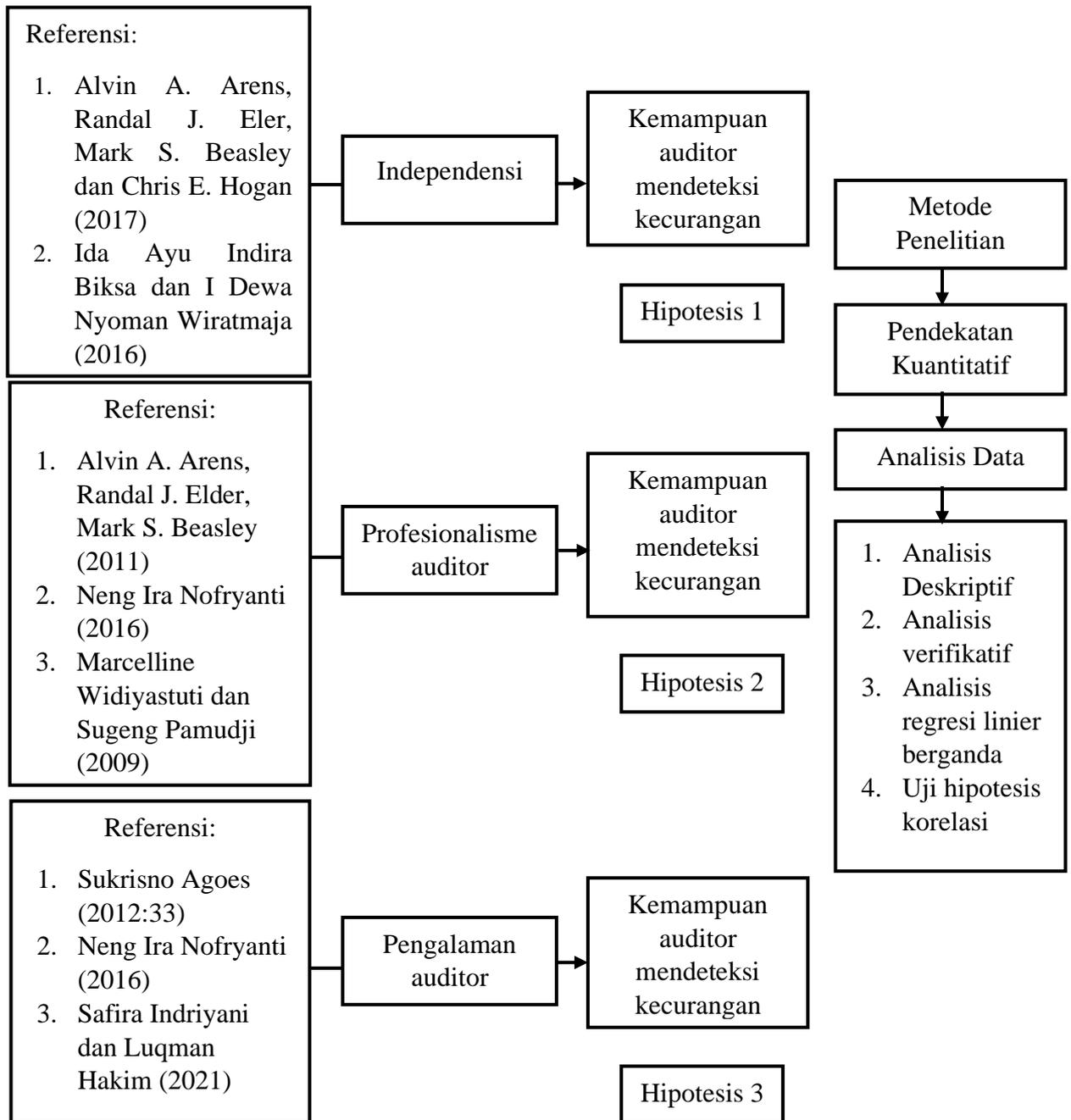


Gambar 2. 4
Kerangka Pemikiran secara simultan

2.2.6 Paradigma Kerangka Pemikiran

Landasan Teori			
Independensi	Profesionalisme auditor	Pengalaman auditor	Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan
1. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark	1. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dialih	1. Sukrisno Agoes (2012:33) 2. Mulyadi (2014:25)	1. Muhammad Noval (2019:145)

<p>S. Beasley (2017:134)</p> <p>2. Sukrisno Agoes (2013:146)</p> <p>3. Arum Ardiningsih (2021:25)</p> <p>4. Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:63)</p> <p>5. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dialih bahasakan oleh Heman Wibowo (2016:103)</p> <p>6. Sukrisno Agoes (2012:34-35)</p> <p>7. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:108)</p> <p>8. Siti Kurnia Rahayu (2014:51)</p> <p>9. Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta (2011:7)</p>	<p>bahasakan oleh Herman Wiboso dan Tim perti (2015:105)</p> <p>2. <i>The Institute Of Internal Auditor</i> (2017:21)</p> <p>3. Sukrisno Agoes (2017:69)</p> <p>4. Mulyadi (2008:156)</p> <p>5. Hall (1968) dalam Hayes (2008)</p> <p>6. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2011:71)</p> <p>7. Standar profesi akuntan publik (SPAP)</p>	<p>3. Neng ira (2016)</p> <p>4. Ida Ayu Biksa dan I Dewa Nyoman W (2016)</p> <p>5. SK Menkeu No17/PMK.0 1?2008</p>	<p>2. Hery (2016:1)</p> <p>3. Ajeng Wind (2017:3)</p> <p>4. Karyono (2013:17-24)</p> <p>5. Ajeng Wind (2017:6)</p> <p>6. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015)</p> <p>7. Hery (2014:200)</p> <p>8. Gizta (2020)</p> <p>9. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2016:35)</p> <p>10. Ida Ayu Biksa dan I Dewa Nyoman W (2016)</p> <p>11. Karyono (2013:92-94)</p>
--	---	--	---



Gambar 2. 5
Bagan Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) menjelaskan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

H₂ : Profesionalisme auditor terpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

H₃ : Pengalaman auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

H₄ : Independensi, Profesionalisme auditor, dan Pengalaman auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.